



Persuasi Politik melalui Bantuan Sosial: Studi Kasus tentang Persepsi Publik dan Perilaku Memilih pada Pemilihan Umum 2024

Rohmad Aditiya Utama ^{1*}, Suciati ²

¹⁻² Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

Email : rohmad.utama@students.paramadina.ac.id suciati@students.paramadina.ac.id

Abstract This writing discusses the analysis of the impact of social assistance on public perception and voting behavior in the 2024 General Election. Through interviews with various informants, the research findings reveal diverse views regarding the relationship between social assistance and voting behavior. The findings categorize the main themes into perceptions of social assistance, the influence of social assistance on voting behavior, and factors influencing voter decisions. The research results indicate that the receipt of social assistance does not have a significant direct influence on voter decisions in the general election. Factors such as personal integrity, candidate performance, and their vision and mission play a more determining role in the decision-making process by voters. Although social assistance may be considered a strategy of money politics, its effect on voter behavior is limited. This research highlights the importance of integrity, transparency, and accountability in providing social assistance to ensure that its goals for social welfare are not compromised by political interests. Proposed recommendations include increasing transparency and accountability in the provision of social assistance, political education for the public, strengthening democratic principles in social assistance programs, and encouraging active participation of the community in the democratic process. These findings provide important insights into the dynamics of voter behavior and emphasize that voters have the ability to make independent decisions based on substantial considerations of the quality and potential of candidates.

Keywords : Social Assistance (BANSOS), 2024 Presidential Election, Politicization of Social Assistance, Voter Behavior

Abstrak Penulisan ini membahas analisis dampak bantuan sosial terhadap persepsi publik dan perilaku memilih pada Pemilihan Umum 2024. Melalui wawancara dengan berbagai informan, temuan penelitian mengungkapkan pandangan yang beragam terkait dengan hubungan antara bantuan sosial dan perilaku memilih. Temuan tersebut mengkategorikan tema utama menjadi persepsi terhadap bantuan sosial, pengaruh bantuan sosial terhadap perilaku memilih, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan bantuan sosial tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap keputusan pemilih dalam pemilihan umum. Faktor-faktor seperti integritas pribadi, kinerja calon, dan visi misi mereka memiliki peran yang lebih menentukan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemilih. Meskipun bantuan sosial dapat dianggap sebagai strategi money politics, efeknya terhadap perilaku pemilih terbatas. Penelitian ini menyoroti pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial untuk memastikan bahwa tujuannya untuk kesejahteraan sosial tidak dikompromikan oleh kepentingan politik. Rekomendasi yang diusulkan meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial, pendidikan politik bagi masyarakat, penguatan prinsip demokrasi dalam program bantuan sosial, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang dinamika perilaku pemilih dan menekankan bahwa pemilih memiliki kemampuan untuk membuat keputusan independen berdasarkan pertimbangan yang substansial tentang kualitas dan potensi calon.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Persepsi Publik, Perilaku Memilih

I. PENDAHULUAN

Bantuan Sosial (Bansos) menjadi salah satu topik yang banyak menjadi perbincangan di ruang publik pada perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini disebabkan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) atau bansos di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat alokasi anggaran untuk belanja Perlinsos tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp496,8 triliun. Alokasi tersebut meningkat

Rp53,3 triliun dari anggaran pada 2023 yang sebesar Rp443,5 triliun, atau tumbuh 12,02% secara tahunan (*year-on-year/yo*y). Alokasi ini bahkan juga hampir menyamai anggaran Perlinsos pada 2020 yaitu sebesar Rp498,0 triliun saat terjadi krisis pandemi Covid- 19 (Elena, 2024).

Pos anggaran untuk program perlindungan sosial tersebut disalurkan dalam empat bentuk program yaitu bantuan pangan, bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Dari keempat program-program tersebut, dua diantaranya merupakan program baru yaitu bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan. Pemerintah Indonesia menetapkan bantuan pangan yang disalurkan adalah berupa beras sebanyak 10 kilogram per keluarga per bulan yang ditargetkan terealisasi hingga Juni 2024. Selain itu pemerintah juga menyalurkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp 600 ribu per bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat dan dicairkan pada bulan Februari 2024 (Piri, 2024).

Hal ini kemudian menimbulkan kontroversi tersendiri bagi publik terutama para pegiat demokrasi. Tidak hanya karena nominalnya yang fantastis namun juga karena periode pelaksanaannya yang digenjut ketika mendekati hari pemungutan suara Pilpres 2024. Bansos yang dialokasikan oleh pemerintah tersebut dianggap sangat politis dan dapat menguntungkan pasangan calon tertentu.

Meskipun, pada dasarnya bansos adalah gagasan dan program dari pemerintah yang dilandasi oleh niat baik menolong dan membantu masyarakat miskin serta kelompok rentan yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, program bansos setidaknya harus memperhatikan tiga prinsip yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Namun, untuk memenuhi ketiga prinsip tersebut pelaksanaan program bansos di Indonesia masih diselimuti masalah mendasar yang berkaitan dengan ketersediaan dan akurasi data, masalah regulasi dan tata kelola, serta masalah teknis dan non-teknis lainnya (Prasetyo, dkk, 2023). Dari penjelasan tersebut dalam konteks bansos menjelang Pilpres 2024, masalah yang banyak dibahas adalah berkaitan dengan prinsip ketepatan waktu penyaluran bansos serta masalah regulasi dan tata kelola.

Terlebih, tindakan Presiden Jokowi yang selalu turun langsung untuk membagikan bansos kepada masyarakat semakin memperkuat anggapan adanya politisasi bansos. Tindakan tersebut dianggap semakin mengesankan adanya praktik politik klientelisme atau transaksional. Karena tokoh terkesan ingin mendapatkan kompensasi dari program yang dijalankan, mengharapkan adanya efek elektoral dari rakyat untuk melancarkan agenda politiknya. Dalam kasus ini, tindakan Presiden Jokowi dianggap sangat berkaitan erat dengan anak sulungnya yaitu

Gibran Rakabuming Raka yang sedang menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Klientelisme merupakan fenomena sosial politik, di Indonesia fenomena ini selalu berkaitan erat dengan momentum Pilpres. Secara garis besar, klientelisme dapat dipahami sebagai relasi kuasa antara aktor politik yang memberikan sesuatu (patron) non-programatik dengan pihak yang menerima (klien) yang didasari oleh pemberian loyalitas oleh penerima (paternalistik) (Ramadhan, dkk, 2019). Namun, klientelisme bukanlah suap. Menurut Hicken, suap adalah transaksi yang hanya terjadi dalam satu waktu sementara klientelisme berkaitan dengan hubungan transaksional yang diliterasikan atau berlanjut (Hicken, 2011).

Menurut pengamat kebijakan publik Ah Maftuchan (2024) praktik politik klientelisme dapat berdampak buruk karena mengancam demokrasi substantif sekaligus mengancam pemenuhan hak-hak dasar warga. Hal tersebut didasarkan pada argumen bahwa praktik politik yang baik adalah ketika pemerintah menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga tanpa memandang aspirasi politiknya. Hak-hak dasar warga harus dipenuhi oleh pemerintah dan tidak perlu dipolitisasi (Saptohutomo, 2024).

Tidak cukup sampai disitu, permasalahan bansos dalam Pilpres 2024 tidak hanya sebatas riak-riak dari para pakar dan komentator politik. Namun, isu terkait politisasi bansos ini juga diangkat dalam materi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kubu nomor urut 1 pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sekaligus juga kubu nomor urut 3 pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Bahkan anggota Tim Hukum kubu nomor urut 1, Bambang Widjojanto dalam gugatan di MK secara tegas menyoroti bahwa Presiden Jokowi disebut telah melakukan pengerahan bantuan sosial (bansos) dan 'politik gentong babi' (*pork barrel politics*) pada pilpres (cnnindonesia.com, 27/3/2024). Selain itu, Didin Damanhuri yang menjadi salah satu ahli yang dihadirkan Tim Hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menerangkan bahwa penggelontoran dana bansos yang masif pada Pilpres 2024, melibatkan banyak menteri di kabinet Jokowi yang turut mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Didin juga menilai hal ini sebagai bentuk 'politik gentong babi' (*pork barrel politics*). Praktik politik semacam ini menjadi sangat efektif, terutama di tengah masyarakat yang masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Bantuan seperti bansos pangan dan tunai menjadi obat bagi krisis ekonomi, terutama di kalangan yang literasi politiknya masih rendah, dengan lebih dari 50% penduduk berada di bawah garis kemiskinan (Taufani, 2024).

Konsep ‘politik gentong babi’ (*pork barrel politics*) pada dasarnya berkembang secara bertahap dari berbagai pemikiran dan observasi tentang perilaku politisi dalam mengalokasikan anggaran pemerintah. Istilah ‘gentong babi’ sendiri awalnya digunakan oleh Edward Everett Hale sebagai metafora sederhana untuk semua jenis pengeluaran publik untuk warga dalam karya populernya *The Children of the Public* (1910), kemudian istilah itu baru digunakan oleh Chester Collins Maxey dalam artikel "*A Little History of Pork*" dalam *National Municipal Review* pada tahun 1919. Maxey mengatakan bahwa kebiasaan memberikan daging babi asin kepada budak kulit hitam selama Perang Saudara (1861-1865) adalah asal dari istilah ‘gentong babi’. Istilah ‘gentong babi’ menunjukkan rasa tidak hormat. Pada masa itu, para budak kulit hitam memperebutkan daging babi yang telah diasinkan yang diberikan oleh tuan pemilik budak (Isnaeni, 2010).

William Niskanen (1971) dalam *Bureaucracy and Representative Government* menjelaskan bagaimana politisi memiliki insentif untuk mengalokasikan anggaran ke proyek-proyek yang menguntungkan konstituen mereka, bahkan jika proyek tersebut tidak efisien atau tidak menguntungkan secara nasional (Niskanen, 1971). Selain itu seorang politisi juga memiliki naluri untuk berusaha memaksimalkan peluang mereka agar dapat terpilih kembali, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengalokasikan anggaran ke proyek-proyek yang populer di kalangan konstituen mereka (Mesquita, *et al.* 1999).

Dari penjelasan di atas, secara garis besar konsep ‘politik gentong babi’ (*pork barrel politics*) mengacu pada fenomena pengeluaran yang dilakukan oleh politisi atau anggota parlemen untuk konstituennya sebagai imbalan atas dukungan politik mereka, baik dalam bentuk suara dalam pemilihan umum atau kampanye. Tujuannya adalah agar mereka dapat memenangkan pemilu berikutnya. Jika memakai dua konsep yang telah dijabarkan di atas, klientelisme dan ‘politik gentong babi’, hubungan antara bansos terhadap persepsi publik dan perilaku memilih tampak sangatlah dekat, bansos dianggap menjadi faktor yang dapat membentuk persepsi publik terhadap figur politisi tertentu sehingga pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana perilaku memilih pada Pilpres 2024.

Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- Bagaimana persepsi publik dalam menilai kebijakan bantuan sosial yang disalurkan menjelang Pilpres 2024?
- Apakah bansos dipersepsikan sebagai alat persuasi dalam Pilpres 2024?

– Bagaimana hubungan bansos dan perilaku memilih pada Pilpres 2024?

Penelitian Terdahulu: Belajar dari Kasus di Amerika Latin

Berdasarkan studi yang berjudul “*Incorporating Marginal Citizens and Voters: The Conditional Electoral Effects of Targeted Social Assistance in Latin America*” menunjukkan bahwa penerima bantuan sosial lebih cenderung mendukung petahana, dan efektivitas program-program ini bergantung pada faktor-faktor seperti pengendalian program, undang-undang wajib memilih, dan ideologi aktor pemegang kekuasaan. Dampak bantuan sosial terhadap perilaku memilih bervariasi berdasarkan perbedaan konteks politik dan program di tingkat negara.

Penelitian yang dilakukan di negara-negara di Amerika Latin tersebut menyelidiki pengaruh program bantuan sosial terhadap perilaku memilih, dengan fokus khusus pada program transfer uang tunai bersyarat. Penelitian ini mengungkap bahwa penerimaan bantuan sosial memiliki dampak signifikan terhadap perilaku memilih, terutama dalam hal kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara dan pilihan suara mereka. Secara khusus, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan sosial cenderung lebih mendukung petahana dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Penelitian yang menggunakan model logit multinomial tersebut menganalisis hubungan antara penerimaan bantuan sosial dan hasil pemilihan. Pendekatan ini diterapkan ketika variabel respon sifatnya estimasi parameter dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan kategori dasar dari variabel penelitian untuk menyelidiki hubungan antara faktor-faktor karakteristik, sehingga model ini dapat digunakan sebagai analisis hubungan antara penerimaan bantuan sosial dan hasil pemilihan, menemukan bahwa penerimaan bantuan sosial dapat mendorong terjadinya peningkatan dukungan petahanan dan partisipasi pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.¹ Penelitian tersebut juga mengeksplorasi bagaimana partisipasi petahana dan oposisi, persepsi situasi ekonomi nasional, dan faktor lainnya mempengaruhi perilaku memilih. Penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor interaksi saat menafsirkan efek bantuan sosial terhadap perilaku memilih.

Selain itu, penelitian tersebut menyoroti bahwa kontrol program bantuan sosial oleh lembaga eksekutif dapat mempengaruhi hasil pemilihan, dengan penerima lebih cenderung mendukung petahana. Namun, efektivitas program ini bergantung pada faktor-faktor institusional seperti pemungutan suara wajib dan kontrol program. Penelitian tersebut juga mengajukan pertanyaan tentang apakah pemilih bersikap retrospektif atau prospektif dalam pilihan mereka, dan menyoroti *trade-off* antara politik programatik dan politik berbasis akuntabilitas dalam kebijakan sosial yang ditargetkan.

Analisis ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial dapat memobilisasi non-pemilih dan mengubah pemilih oposisi, tetapi efeknya bervariasi berdasarkan perbedaan politik dan program di tingkat negara. Program bantuan sosial, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini, memiliki potensi untuk menurunkan biaya dan meningkatkan manfaat dari kehadiran di tempat pemungutan suara bagi warga negara yang terpinggirkan (*marginalized*) yang sebelumnya hanya memiliki sedikit hubungan dengan negara atau sistem politik.

Sementara itu, efek mobilisasi ini justru kurang berdampak di negara-negara dengan aturan pemungutan suara wajib, yang sudah mendorong partisipasi di antara banyak warga negara yang ditargetkan oleh program bantuan sosial. Namun, pemilih yang baru terlibat di bawah aturan pemungutan suara wajib cenderung memberikan bobot yang kuat pada manfaat bantuan saat memutuskan dukungan mereka, karena mereka tidak memiliki ikatan politik sebelumnya.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa bantuan sosial membuat penerima lebih cenderung hadir dan memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara, untuk memilih petahana. Hukum pemungutan suara wajib dan politisasi bansos memperbesar efek elektoral, tetapi efeknya tidak bervariasi berdasarkan ideologi aktor penguasa atau kondisionalitas program. Ini konsisten dengan perspektif bahwa pemilih Amerika Latin adalah agen rasional terbatas yang bersifat retrospektif, dan pilihan perilaku mereka bergantung pada sumber daya dan konteks lingkungan mereka.

2. METODELOGI

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental. Menurut Creswell (2016), Penelitian studi kasus instrumental tunggal (*single instrumental case study*) adalah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan suatu isu atau perhatian. Penelitian ini melihat persepsi dan perilaku memilih dalam penyaluran bansos saat menjelang Pilpres 2024. Pengumpulan informasi dalam studi kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara pada informan serta berbagai dokumen dan laporan yang sudah ada sebelumnya dan bahan materi berbentuk audio visual.

Pengumpulan data penelitian dilakukan menggunakan teknik: (1) wawancara mendalam dan (2) studi literatur. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder yakni:

- Data primer melalui wawancara dengan informan terkait penerimaan bantuan sosial pada Pilpres 2024, sehingga peneliti menentukan bahwa informan yang digunakan dalam

penelitian ini sebanyak 5 informan, sebab patokan peneliti dalam menentukan jumlah informan bukan pada keterwakilan (representasi), namun terhadap kedalaman informasi yang telah cukup.

- Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, melalui studi literatur seperti buku, jurnal, laporan penelitian ilmiah, dan literatur lain yang kredibel termasuk dokumen kebijakan; perundang-undangan, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan berita cetak maupun online, diskusi dalam podcast, video blog, televisi, radio, serta dokumentasi yang menunjang atau berhubungan dengan tema dari penelitian yang akan dilakukan yang didapatkan dari perpustakaan, toko buku, serta dokumentasi saat penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, metode purposif digunakan untuk memilih informan (O'Reilly, 2009). Metode ini memungkinkan untuk memilih informan berdasarkan kriteria penelitian, yaitu penerima manfaat bansos dan ahli yang relevan dengan topik penelitian. Karena penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan, metode purposif tidak mementingkan berapa banyak informan representatif (populasi) yang diwawancarai. Metode pemilihan informan purposif berarti mencari informan yang dapat memberikan informasi sebanyak mungkin tentang subjek penelitian.

Daftar kriteria informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Kriteria Informan

| No | Informan | Wilayah/ Instansi | Usia | Gender | Jumlah |
|------------------------|--|--------------------|------|--------|----------|
| 1 | Penerima manfaat bansos | Jakarta | 29 | P | 1 |
| 2 | Penerima manfaat bansos | Banten | 25 | P | 1 |
| 3 | Penerima manfaat bansos | Jawa Timur | 43 | P | 1 |
| 4 | Ahli dari akademisi/universitas | Universitas | 50 | P | 1 |
| 5 | Ahli dari peneliti di lembaga pemerintah | Lembaga Pemerintah | 49 | P | 1 |
| Jumlah informan | | | | | 5 |

Data hasil wawancara yang didapatkan melalui informan kemudian diuji validasi/keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data. Dimana dalam trigulasi sumber data peneliti dapat membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah, menengah dan tinggi, orang berada dan orang pemerintahan,

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Penelitian ini melakukan triangulasi data dengan wawancara terhadap informan yang berbeda, selanjutnya data yang didapatkan dari masing-masing informan dibandingkan satu sama lain. Data kemudian dianalisis menggunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman (Emriz, 2011; Miles & Huberman, 1994).

Analisis data dimulai dengan pengumpulan data (*data collection*), dengan melakukan perbandingan-perbandingan, konseptualisasi, kategorisasi, ataukah teorisasi (Faisal, 2010). Selanjutnya reduksi data (*data reduction*) melalui kegiatan pengolahan data, pemilihan dan pemfokusan data sehingga ditemukan tema dan polanya. Reduksi data yang dilakukan selanjutnya akan menjadi pijakan untuk mencari data selanjutnya. Kemudian data diorganisasikan (*display data*) sehingga terlihat konstruksi data secara lebih utuh. Terakhir *conclusion drawing and verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya (Emriz, 2011; Sugiyono, 2009b).

Gambaran Umum Kasus

Penelitian ini berangkat dari kontroversi seputar penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia. Kebijakan pemerintah, di bawah arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengalokasikan dana besar untuk program Perlindungan Sosial (Perlinsos), termasuk bansos, yang meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pengalokasian dana ini mencakup bantuan pangan dan tunai yang ditujukan kepada jutaan keluarga, yang dilakukan menjelang Pilpres, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya politisasi program ini untuk mendukung pasangan calon tertentu.

Analisis dari para ahli dan pakar, termasuk dalam konteks gugatan di Mahkamah Konstitusi Pilpres 2024, menyoroti potensi praktik politik klientelisme dan 'politik gentong babi' yang terkait dengan penyaluran bansos ini. Klientelisme merujuk pada pemberian bantuan yang tidak didasarkan pada kriteria program yang jelas, tetapi lebih kepada mendapatkan dukungan politik dari penerima bantuan. Di sisi lain, 'politik gentong babi' mengacu pada alokasi anggaran yang digunakan untuk mempengaruhi opini dan dukungan politik melalui program-program yang memiliki kepentingan politik tertentu, melebihi sekadar kebutuhan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana Bansos tidak hanya menjadi instrumen kebijakan sosial, tetapi juga bagaimana memiliki keterkaitan dengan

dinamika politik di Indonesia jelang Pilpres 2024. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan narasi dari berbagai pihak terkait, termasuk penerima bansos dan bukan penerima bansos, termasuk didalamnya juga ahli atau pengamat. Analisis mendalam ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kompleksitas kebijakan bansos dalam konteks politik nasional menjelang Pilpres 2024.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan yang jelas dalam fokus dan ruang lingkupnya. Pertama, penelitian ini membatasi diri pada kasus penyaluran bansos yang dilakukan pada periode Januari dan Februari 2024 menjelang pemungutan suara Pilpres di Indonesia. Fokus penelitian hanya difokuskan pada dua program bansos, yaitu bantuan pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan.

Kedua, dalam penggunaan istilah "publik", istilah ini secara khusus merujuk pada informan yang terlibat dalam penelitian ini. Informan tersebut terdiri dari 3 penerima manfaat bansos yang diwawancarai untuk memahami langsung persepsi dan pengalaman mereka terkait dengan program bansos yang diselenggarakan menjelang Pilpres 2024. Selain itu, terdapat 2 informan ahli yang juga akan menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan pandangan dari perspektif yang berbeda terkait implementasi program ini.

Ketiga, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini tidak bermaksud untuk membuat generalisasi atas hasil temuan yang diperoleh. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam persepsi dan pengalaman informan yang diteliti oleh peneliti. Hal ini diperlukan untuk memahami dinamika kompleks dari program bansos dalam konteks politik menjelang Pilpres 2024.

Dengan membatasi fokus pada kasus konkret, menggunakan informan yang relevan, dan menekankan pada deskripsi mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami bagaimana Bansos dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku politik masyarakat di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan presiden yang mendatang

3. LANDASAN TEORI

Persepsi

Persepsi adalah proses kognitif yang membantu seseorang memahami pengalaman mereka, bagaimana mereka menerima, menyaring informasi, dan menentukan perilaku yang mereka lakukan sebagai interpretasi dari informasi tertentu (Weintraub, Candice & Kerry, 2013). Persepsi merupakan proses yang terdiri dari tiga bagian yakni memilih, mengatur, dan menafsirkan suatu informasi sehingga informasi tersebut masuk akal bagi diri seorang individu.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi persepsi, di antaranya sebagai berikut: usia, gender, mood fisiologis, stereotip, budaya, dan pengalaman pribadi. Menurut Hovlad (Effendy, 2013:255) menyatakan bahwa dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variabel penting yaitu, perhatian, penegrtian dan penerimaan, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa proses perubahan sikap tampak bahwa sikap dapat berubah , hanya jika stimulus yang menerpa benar-benar melebihi semula. Hal ini sejalan dengan pernyataan Walgito (2012:99) yang menyatakan bahwa bila objek persepsi sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia luarnya dan menerima stimulus atau rangsangan dari luar disamping dari dalam dirinya sendiri dengan menggunakan alat indranya.

Proses bagaimana stimulus-stimulus yang mempengaruhi tanggapan-tanggapan itu diseleksi dan diinterpretasikan, persepsi setiap orang terhadap suatu objek itu bisa berbeda-beda oleh sebab itu persepsi mempunyai sifat subjektif. Stimulus diartikan sebagai bentuk fisik atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Salah satu stiulus yang penting yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen adalah lingkungan (sosial dan budaya) karena persepsi setiap orang berbeda maka persepsi bersifat subjektif. Persepsi seorang konsumen akan berbagai stimulus yang diterimanya di pengaruhi oleh karakteristik yang dimilikinya (Sutisna, 2001).

Berdasarkan teori di atas, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap persepsi publik. Persepsi juga merupakan sebuah proses penciptaan makna secara aktif dengan cara menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan objek, peristiwa, situasi, dan fenomena lainnya (Wood, 2016). Proses persepsi dimulai ketika seseorang menyeleksi sebuah informasi dan menerima stimulan dari sebuah objek. Informasi yang diterima oleh orang tersebut kemudian diatur dalam skema-skema kognitif dalam otak. Setelah itu terjadi proses pengaturan informasi yang akan memudahkan seseorang untuk menginterpretasikan persepsinya dengan masuk akal (Wood, 2016). Begitu pula konsep ini juga berlaku bagi persepsi yang muncul dalam masyarakat. Persepsi yang muncul dalam masyarakat merupakan hasil interpretasi dari proses selektif yang telah dilakukan pertama kali saat menerima informasi. Saat melakukan interpretasi terhadap informasi tertentu dibutuhkan keberadaan atribusi. Atribusi sendiri adalah penjelasan tentang mengapa sesuatu hal dapat terjadi atau mengapa seseorang bisa bertindak dengan cara yang berbeda-beda (Calista & Mohammad, 2021).

Perilaku Memilih

Perilaku pemilih (*voting behavior*) merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan

pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Sedangkan menurut Haryanto (2000), Voting adalah: “Kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan di daftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya”. Perilaku memilih (*voting behavior*) menurut Jack C Plano adalah dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu.

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan kedalam dua kubu yaitu ; Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan (Fadillah Putra, dalam Yongki Sapito (2012: 10). Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu.

Perilaku memilih berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam pemilihan umum, mencakup seberapa banyak warga negara yang berpartisipasi dalam pemilu dan alasan mereka memutuskan untuk ikut serta atau absen dalam pemilihan tersebut. Ini juga mencakup pilihan warga terhadap partai politik atau calon anggota legislatif, presiden, atau pilkada, termasuk partai atau calon mana yang dipilih dan alasan pemilihan tersebut.

Susanto (1992) mengartikan voting behavior adalah serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pilkada, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok dan menunjukkan loyalitas terhadap partai. Hubungan perilaku memilih (*voting behavior*) dalam Pemilu. Untuk melihat kecenderungan perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul *Political Science and Political Behavior* (1983) menyatakan terdapat 3 model pendekatan di dalam perilaku memilih (*voting behavior*), yakni, pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional.

Lebih jauh, Mujani, Liddle dan Ambardi (2012) menjelaskan perilaku memilih merujuk pada tindakan dan proses keputusan yang dilakukan oleh warga negara dalam partisipasi pemilihan umum, perilaku memilih merupakan aspek krusial dari partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Partisipasi dalam pemilu mencakup seberapa banyak warga negara yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, termasuk mengapa seseorang memutuskan untuk ikut serta atau absen dalam pemilihan umum tersebut. Perilaku memilih tidak hanya mencakup tindakan memilih itu sendiri tetapi juga proses keputusan yang melatarbelakanginya, termasuk pilihan partai politik atau calon yang dipilih oleh seorang pemilih dan alasan di balik pilihan tersebut. Dengan demikian, perilaku memilih adalah inti dari partisipasi politik masyarakat

dalam pemilu, mencerminkan bagaimana dan mengapa warga negara terlibat dalam proses demokrasi melalui pemilihan umum.

Dalam pemahaman perilaku memilih dalam konteks pemilihan umum, tiga model utama yang sering digunakan sebagaimana disebutkan di atas yaitu model sosiologis, psikologis, dan rasional. Masing-masing model ini menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami bagaimana dan mengapa pemilih membuat keputusan tertentu saat berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Model Sosiologis

Model ini menekankan pada pengaruh karakteristik sosiologis pemilih terhadap perilaku memilih. Model ini melihat faktor-faktor seperti kelas sosial, agama, etnis, dan kelompok sosial lainnya yang dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap pilihan politik seseorang. Model ini berangkat dari asumsi bahwa individu cenderung memilih partai atau calon yang paling sesuai atau mendukung kepentingan kelompok sosial mereka.

Dalam konteks pemilihan umum, perilaku memilih model sosiologis ini kemudian disempurnakan dengan konsep yang disebut *Socio Economic Status (SES)* dan *Civic Voluntary Model (CVM)*. Secara sederhana, *Socio Economic Status (SES)* merujuk pada posisi ekonomi dan sosial individu atau kelompok dalam struktur sosial, yang diukur melalui kombinasi dari pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Model sosiologis memandang SES sebagai faktor penting yang mempengaruhi perilaku memilih, dengan asumsi bahwa individu atau kelompok dengan status sosioekonomi yang serupa cenderung memiliki preferensi politik yang serupa. Sementara itu, *Civic Voluntary Model (CVM)* merujuk pada pemahaman bahwa partisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya dipengaruhi oleh kesadaran individu tentang arti penting pemilu bagi kepentingan dirinya dan masyarakat banyak. Model ini mengemukakan bahwa individu berpartisipasi dalam pemilu karena mereka memiliki tingkat pendidikan, status pekerjaan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan yang memungkinkan mereka untuk mengerti dan merasa terlibat dalam proses politik. CVM menekankan pada peran kesadaran sipil dan keterlibatan sukarela dalam aktivitas politik sebagai faktor utama yang mendorong partisipasi pemilih (Mujani, Liddle, Ambardi, 2012).

Model Psikologis

Model Psikologis dalam pemahaman perilaku memilih adalah pendekatan yang menitikberatkan pada faktor-faktor psikologis individu sebagai penentu utama dalam keputusan memilih mereka di dalam pemilihan umum. Berbeda dengan model sosiologis yang lebih menekankan pada pengaruh lingkungan sosial dan ekonomi, model psikologis berfokus pada

proses internal pemilih, seperti sikap, afeksi, dan identifikasi terhadap partai atau calon tertentu. Model ini berpandangan bahwa seorang harus tertarik dan punya ikatan psikologis dengan partai atau calon tertentu untuk memilihnya dalam pemilu. Ini mencakup aspek-aspek seperti identitas partai, informasi politik yang cukup, perasaan bahwa suara mereka berarti, dan keyakinan bahwa pilihan mereka dapat memperbaiki keadaan (*political efficacy*) (Mujani, Liddle, Ambardi, 2012).

Menurut model psikologis, partisipasi pemilih dalam pemilu bukan hanya karena kondisi mereka yang lebih baik secara sosial-ekonomi atau karena mereka berada dalam jaringan sosial tertentu, tetapi karena mereka tertarik dengan politik dan merasa memiliki hubungan dekat dengan partai atau calon tertentu. Ini menunjukkan bahwa motivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh faktor internal pemilih, termasuk bagaimana mereka memproses informasi politik dan bagaimana mereka secara psikologis terhubung dengan isu-isu atau figur politik. Model Psikologis juga memperkenalkan konsep budaya demokrasi atau *civic culture*, yang lebih spesifik lagi sebagai budaya partisipasi politik. Ini menekankan pentingnya nilai-nilai demokratis dan partisipasi aktif warga dalam kehidupan politik sebagai bagian dari identitas psikologis mereka (Mujani, Liddle, Ambardi, 2012).

Model Pilihan Rasional

Model Pilihan Rasional adalah pendekatan dalam memahami perilaku memilih yang berangkat dari asumsi bahwa individu bertindak secara rasional dalam proses pengambilan keputusan politik. Menurut perspektif ini, pemilih sebagai individu rasional yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan manfaat dan biaya. Dalam model ini, pemilih mengevaluasi berbagai alternatif pilihan politik yang tersedia dan memilih opsi yang mereka anggap akan memberikan hasil terbaik bagi diri mereka sendiri. Model ini menekankan pada kalkulasi rasional dan kepentingan pribadi dalam proses pengambilan keputusan politik. Anthony Downs, salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini, melihat demokrasi sebagai arena di mana pemilih dan partai politik berinteraksi dalam sebuah pasar politik. Pemilih akan memilih partai atau calon yang menawarkan kebijakan yang paling menguntungkan bagi mereka, seolah-olah bertransaksi dalam pasar bebas. Teori ini juga menekankan pada konsep "nilai demokrasi" dan "kewajiban warga negara", di mana pemilih merasa memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pemilu meskipun mungkin tidak mendapatkan insentif pribadi yang langsung. Dengan demikian, Model Pilihan Rasional memberikan kerangka kerja untuk memahami perilaku pemilih yang didasarkan pada kalkulasi rasional keuntungan dan kerugian dari pilihan politik yang mereka hadapi (Mujani, Liddle, Ambardi, 2012).

Temuan Penelitian

Dari temuan wawancara yang telah dilakukan, kita dapat melakukan beberapa

perbandingan, konseptualisasi, kategorisasi, dan teorisasi mengenai hubungan antara bantuan sosial (bansos) dan perilaku memilih. Temuan ini mengungkapkan pandangan yang beragam dari informan terkait dengan dampak bansos terhadap perilaku pemilih, yang dapat dikategorikan menjadi beberapa tema utama: persepsi terhadap bansos, pengaruh bansos terhadap perilaku memilih, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih.

Persepsi Terhadap Bansos

Persepsi terhadap bansos terbagi menjadi dua pandangan utama. Pertama, ada yang berpendapat bahwa bansos merupakan bagian dari program pemerintah yang sudah direncanakan dengan jadwal tersendiri dan tidak ada hubungannya dengan pesta demokrasi. Pandangan ini menekankan bahwa bansos sudah diberikan sejak lama sebelum masa pemilu 2024 dan merupakan upaya pemerintah pusat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera sosial.

"Kalau menurut pandangan saya kembali lagi ke makna apa itu bantuan sosial, berarti bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Kapan pemerintah secara teoritis harus memberikan bantuan sosial, itu tergantung kebutuhan penerima bantuannya. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pemilu, tergantung kebutuhan sebelum pemilu atau sesudah pemilu."

(ASS, Ahli dari peneliti di lembaga pemerintah)

"Bantuan sosial yang diberikan menjelang masa pemilihan presiden tidak ada sangkutannya dengan proses pemilihan presiden 2024, karena bantuan sosial itu sudah diberikan sejak lama sebelum adanya masa PEMILU 2024, pada dasarnya pemerintah pusat memiliki agenda untuk memberikan atau membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kehidupan agar menjadi masyarakat yang sejahtera sosial atau untuk pemerataan ekonomi masyarakat sehingga tidak ada kesenjangan." **(HKH, Ahli dari akademisi/universitas)**

"Sebernya gapapa, karena yang saya tahu adalah bahwa apapun yang akan dilakukan pemerintah pastinya sudah terencana dan memiliki jadwal tersendiri. Menurut saya, bantuan sosial sama sekali tidak ada hubungannya dengan pesta demokrasi, karena itu adalah 2 hal yang berbeda. Bantuan sosial tetap harus dijalankan apapun yang terjadi." **(Penerima manfaat bansos, Banten)**

"Bantuan sosial yang diberikan menjelang masa pemilihan presiden tidak akan berpengaruh apa-apa, karena bantuan sosial yang disalurkan telah lama diberikan oleh pemerintah bukan dari ketika Pasangan presiden CAPRES dan CAWAPRES 2024." **(Penerima manfaat bansos, Jawa Timur)**

Kedua, ada pandangan yang menyatakan bahwa bansos dapat dianggap sebagai bentuk *money politics*, terutama jika disalurkan menjelang pemilu, meskipun pengaruhnya terhadap

perilaku pemilih tampaknya terbatas.

“Sebuah survei dari LSI menunjukkan bahwa sekitar 69% penerima bansos pada 2024 memilih pasangan calon 02, namun bansos hanya memiliki peran sebesar 2,9% sebagai faktor yang menentukan preferensi pemilih. Ada kecenderungan orang menganggap seperti itu (bansos disebut sebagai *money politics*, karena melihat momen sekarang, karena kalau dilihat secara umum teori petahana akan melakukan segala cara untuk mendapat suara karena bukan era sekarang aja, ketika ada punya anggaran apa mungkin memanfaatkan itu untuk meraih suara karena ada kecenderungan dan suatu keumuman bukan kelaziman walaupun kita tidak melazimnakan ketidakbenaran yang terjadi, tapi apakah rakyat terpolitisasi dan apakah itu sampai kesasaran atautkah bisa meraih suara atau tidak. **(ASS, Ahli dari peneliti di lembaga pemerintah)**

Dinamika Pengaruh Bansos Terhadap Keputusan Memilih

Terkait dengan pengaruh bansos terhadap perilaku memilih, temuan menunjukkan adanya variasi yang signifikan. Sebagian informan berpendapat bahwa bansos tidak mempengaruhi keputusan pemilihannya karena pilihan mereka lebih didasarkan pada faktor-faktor ketokohan dan integritas calon atau bahkan iming-iming lain berupa politik uang diluar skema bansos.

"Kebanyakan seperti itu (setelah mendapat bansos meningkatkan motivasi untuk memilih), tetapi banyak juga orang yang sudah memiliki integritas. Contoh kecilnya adalah, masih ada beberapa calon yang memberikan serangan fajar saat akan melakukan pencoblosan dan itu tidak hanya dari 1 pasangan calon. Ada beberapa orang yang mendapatkan 2/3 tapi kalau misal orang tersebut sudah memiliki pasangan calon yang menurut dia oke, ya sudah mungkin bantuan sosial apapun itu tidak akan berdampak pada pilihan yang saya miliki." **(Penerima manfaat bansos, Banten)**

Namun, ada juga yang menyatakan bahwa bansos memiliki peran sebesar 2,9% sebagai faktor yang menentukan preferensi pemilih, menunjukkan bahwa meskipun pengaruhnya terbatas, bansos masih dianggap memiliki peran dalam dinamika pemilihan.

“Psikologi politik Hamdi Muluk mengatakan bahwa berdasarkan hasil meta analisis bahwa bansos memiliki peran sebesar 2,9% sebagai faktor yg menentukan refrensi pemilih 2,9%. **(HKH, Ahli dari akademisi/universitas)**

Beragam Faktor dalam Keputusan Memilih

Selain bansos, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pemilih. Informan menekankan pentingnya integritas pribadi dan penilaian terhadap calon yang dianggap paling kompeten dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan mereka sebagai warga negara.

Ini menunjukkan bahwa pemilih cenderung menggunakan pertimbangan yang lebih luas dan tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan bansos. Selain itu, pengalaman pribadi dengan layanan sosial, seperti pengalaman gratis berobat di rumah sakit, juga dapat mempengaruhi pilihan pemilih.

"Jika ada hubungan, penyalur bansos dan perilaku pemilih apa yang mendasari masyarakat itu untuk mendapatkan bansos dan memilih dari salah satu pasangan tersebut? Berdasarkan pengalaman sodara saya dan tidak memilih Golkar kalau secara rakyat opisisinya rakyat, suatu hari anaknya sakit dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, diurus atau punya surat keterangan tidak mampu atau yang lain, biaya berobat gratis dan tidak bayar, dan dia bilang saya nanti pemilu pilih Golkar. Menurutnya rumah sakit tersebut bagian dari unsur pemerintah yang peduli dan memperhatikan. Maka dari itu sewajarnya saya pilih pemerintah ini, karena mereka memilih menurut pengalaman batin." (HKH, Ahli dari akademisi/universitas)

4. PEMBAHASAN DAN ANALISIS KELOMPOK

Dari temuan yang sudah disajikan di atas menunjukkan bahwa ada dinamika yang kompleks dalam hubungan antara distribusi bansos jelang Pilpres 2024 dengan persepsi dan perilaku memilih masyarakat. Dalam hal persepsi publik terhadap bansos, persepsi yang muncul dibenak dan pikiran publik setidaknya bisa dikelompokkan menjadi dua kriteria yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Sebagian masyarakat memandang bansos sebagai program pemerintah yang direncanakan dengan baik dan dijalankan secara berkelanjutan, terlepas dari siklus pemilu.

Pandangan ini didukung oleh beberapa informan yang menekankan bahwa bansos adalah upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang sudah berjalan lama sebelum masa Pilpres 2024. Persepsi ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan terhadap niat baik pemerintah dalam mendistribusikan bansos sebagai bagian dari kebijakan publik yang lebih luas, bukan semata-mata untuk tujuan politik.

Di sisi lain, terdapat juga pandangan yang skeptis terhadap distribusi bansos menjelang Pilpres 2024, yang menganggapnya sebagai bentuk *money politics*. Masyarakat yang memiliki pandangan ini cenderung melihat bansos sebagai upaya pemerintah untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat melalui pemberian materi, terutama ketika bansos disalurkan mendekati masa pemilu. Pandangan ini memperlihatkan adanya kecurigaan bahwa pemerintah memanfaatkan bansos untuk mendapatkan dukungan politik, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap niat baik pemerintah dan integritas proses pemilu.

Dari hal tersebut, bisa dipahami bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, salah satu yang menonjol dari temuan penelitian ini adalah adanya faktor informasi politik yang dimiliki masyarakat. Jika merujuk kembali pada konsep perilaku memilih, temuan penelitian menunjukkan adanya kecenderungan informasi politik yang dimiliki masyarakat cukup memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi pemilih mengenai bansos, ini kemudian dikatakan bahwa dalam hal perilaku memilih masyarakat cenderung masuk dalam kategori perilaku memilih model psikologis. Dimana faktor-faktor psikologis individu sebagai penentu utama dalam keputusan memilih mereka di dalam pemilihan umum, yang mencakup aspek-aspek seperti identitas partai, informasi politik yang cukup, perasaan bahwa suara mereka berarti, dan keyakinan bahwa pilihan mereka dapat memperbaiki keadaan (*political efficacy*) (Mujani, Liddle, Ambardi, 2012).

Informasi yang akurat dan komprehensif mengenai tujuan, jadwal, dan mekanisme penyaluran bansos memungkinkan pemilih untuk memahami program ini sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang telah direncanakan jauh sebelum masa pemilu. Hal ini terlihat dari beberapa informan yang menyatakan bahwa bansos adalah program berkelanjutan yang tidak terkait langsung dengan pesta demokrasi.

Selain model psikologis, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat kecenderungan model perilaku memilih yang rasional. Model ini memandang bahwa pemilih bertindak secara rasional dalam proses pengambilan keputusan politik, model ini menekankan pada kalkulasi rasional dan kepentingan pribadi dalam proses pengambilan keputusan politik. Dimana temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat melakukan evaluasi atas kondisi yang terhubung langsung dengan dirinya atau dalam perspektif perilaku memilih disebut model rasional egosentrik.

Hal tersebut sangat terlihat Ketika publik mempersepsikan bansos sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan bukan merupakan bentuk manipulasi politik. Publik dalam hal ini telah membangun persepsi yang didasarkan pada evaluasi rasional tentang efektivitas program bansos dalam meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Kategori perilaku memilih model rasional egosentrik tidak hanya terlihat pada persepsi yang positif semata, namun persepsi negatif yang menyatakan bahwa bansos disalurkan menjelang Pilpres 2024 dapat dianggap sebagai bentuk *money politics*, juga menunjukkan adanya kecenderungan munculnya perilaku memilih model rasional egosentrik. Dalam perspektif ini, publik dipahami juga melakukan evaluasi atas manfaat jangka pendek dari penerimaan bansos dengan mempertimbangkan apakah insentif tersebut cukup signifikan untuk

mempengaruhi keputusan memilih mereka. Mereka akan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari menerima bansos dalam konteks jangka panjang. Pemilih yang berpikir secara rasional akan menilai apakah manfaat sementara dari bansos lebih penting dari potensi kebijakan yang lebih menguntungkan sebagaimana ditawarkan kandidat lain. Baik publik yang mempersepsikan positif ataupun negatif bansos, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa ada kecenderungan perilaku memilih model rasional, dimana pemilih membuat keputusan berdasarkan kalkulasi manfaat dan biaya yang terkait langsung dengan kepentingan pribadi mereka.

Lebih jauh, persepsi publik terhadap bansos menjelang pilpres 2024 sebagaimana temuan penelitian ini patut menjadi catatan penting bagi proses demokrasi di Indonesia, karena ternyata munculnya perbedaan persepsi dikalangan publik tersebut memberikan sinyal bahwa perlu ada perbaikan tatakelola penyaluran bansos agar tidak menimbulkan kegaduhan dikalangan publik, selain itu juga akan dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintah dalam hal pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

5. PENUTUP DAN KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap temuan penelitian mengenai distribusi bansos jelang Pilpres 2024, dapat ditarik beberapa Kesimpulan tentang bagaimana persepsi dan perilaku memilih masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam hubungan antara distribusi bansos dan persepsi serta perilaku memilih masyarakat. Dalam konteks ini, persepsi publik terhadap bansos dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: persepsi positif dan persepsi negatif.

Sebagian masyarakat memandang bansos sebagai program pemerintah yang direncanakan dengan baik dan dijalankan secara berkelanjutan, terlepas dari siklus pemilu. Pandangan ini didukung oleh beberapa informan yang menekankan bahwa bansos adalah upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka menganggap bahwa bansos telah berjalan lama sebelum masa Pilpres 2024 dan bukan merupakan upaya politik untuk meraih dukungan. Persepsi ini menunjukkan adanya kepercayaan terhadap niat baik pemerintah dalam mendistribusikan bansos sebagai bagian dari kebijakan publik yang lebih luas. Publik yang memiliki pandangan ini melihat bansos sebagai manifestasi dari tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, bukan sebagai strategi politik.

Di sisi lain, terdapat juga pandangan yang skeptis terhadap distribusi bansos menjelang Pilpres 2024. Masyarakat yang memiliki pandangan ini cenderung melihat bansos sebagai

bentuk *money politics*, di mana pemerintah berusaha mempengaruhi pilihan politik masyarakat melalui pemberian bansos. Mereka mencurigai bahwa pemerintah memanfaatkan bansos untuk mendapatkan dukungan politik, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap niat baik pemerintah dan integritas proses pemilu. Persepsi negatif ini memperlihatkan adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, terutama ketika bansos disalurkan mendekati masa pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bansos memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, cara penyalurannya dapat mempengaruhi persepsi publik secara negatif jika dianggap sebagai upaya manipulatif.

Dalam analisis sebelumnya ditemukan bahwa faktor informasi politik memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi pemilih mengenai bansos. Pemilih yang memiliki informasi politik yang cukup cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap bansos. Mereka dapat memahami bahwa program ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah yang telah direncanakan jauh sebelum masa pemilu, dan bukan sekadar alat politik. Ini menunjukkan bahwa informasi yang akurat dan komprehensif mengenai tujuan, jadwal, dan mekanisme penyaluran bansos sangat penting dalam membentuk persepsi publik.

Selain model psikologis, penelitian ini juga menemukan adanya kecenderungan perilaku memilih model rasional. Dalam model ini, pemilih bertindak secara rasional dalam proses pengambilan keputusan politik, dengan menekankan pada kalkulasi rasional dan kepentingan pribadi. Pemilih yang rasional akan mengevaluasi kondisi yang terhubung langsung dengan dirinya, atau yang disebut sebagai model rasional egosentrik. Publik yang mempersepsikan bansos sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sosial, dan bukan sebagai manipulasi politik, menunjukkan bahwa mereka telah membangun persepsi yang didasarkan pada evaluasi rasional tentang efektivitas program bansos dalam meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Kategori perilaku memilih model rasional egosentrik ini juga terlihat pada persepsi negatif yang menyatakan bahwa bansos disalurkan menjelang Pilpres 2024 dapat dianggap sebagai bentuk *money politics*. Pemilih dalam kategori ini melakukan evaluasi atas manfaat jangka pendek dari penerimaan bansos dengan mempertimbangkan apakah insentif tersebut cukup signifikan untuk mempengaruhi keputusan memilih mereka. Mereka menimbang manfaat dan biaya dari menerima bansos dalam konteks jangka panjang, dan menilai apakah manfaat sementara dari bansos lebih penting dibandingkan dengan potensi kebijakan yang lebih menguntungkan yang ditawarkan oleh kandidat lain. Baik publik yang mempersepsikan positif maupun negatif bansos, keduanya menunjukkan adanya kecenderungan perilaku memilih model rasional, di mana pemilih membuat keputusan berdasarkan kalkulasi manfaat dan biaya yang

terkait langsung dengan kepentingan pribadi mereka.

Persepsi publik terhadap bansos menjelang Pilpres 2024 menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus dalam proses demokrasi di Indonesia. Perbedaan persepsi di kalangan publik ini memberikan sinyal bahwa perlu ada perbaikan tata kelola penyaluran bansos agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan di kalangan masyarakat. Hal ini juga penting untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintah dalam hal pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai program bansos sangat penting dalam membentuk persepsi publik yang positif dan memperkuat kepercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis temuan penelitian terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

– **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemberian Bansos**

Untuk memastikan bahwa program bantuan sosial berjalan sesuai dengan tujuan utamanya yaitu kesejahteraan sosial, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian bansos. Hal ini akan membantu mengurangi persepsi negatif terhadap bansos sebagai alat politik dan memastikan bahwa bansos tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

– **Pendidikan Politik bagi Masyarakat**

Pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses demokrasi dan pentingnya memilih berdasarkan pertimbangan yang matang dan rasional. Pendidikan ini dapat membantu pemilih untuk tidak mudah dipengaruhi oleh praktik money politics dan lebih fokus pada kualitas dan integritas calon.

– **Penguatan Prinsip Demokrasi dalam Program Bansos**

Program bantuan sosial harus dijalankan dengan cara yang memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, dengan memastikan bahwa pemberian bansos tidak dikaitkan dengan dukungan politik tertentu. Hal ini akan membantu memastikan bahwa bansos benar-benar berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan tidak menjadi alat politik.

– **Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Proses Demokrasi**

Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas aktif terhadap praktik politik yang tidak sehat. Partisipasi aktif ini dapat membantu memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lebih adil dan transparan.

REFERENSI

- Bisnis.com. (2024, 2 Februari). *Cek fakta bansos jelang Pilpres 2024 tertinggi sepanjang sejarah*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240202/9/1737706/cek-fakta-bansos-jelang-pilpres-2024-tertinggi-sepanjang-sejarah>
- Calista, T., & Shihab, M. (2021). Pembentukan persepsi masyarakat pekerja terhadap vaksinasi COVID-19. *CARAKA: Indonesian Journal of Communications*, 2(1), 20–26.
- CNBC Indonesia. (2024, 2 April). *Profesor IPB sindir bansos Jokowi Rp496 T hingga pork barrel politics*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240402151307-128-527558/profesor-ipb-sindir-bansos-jokowi-rp496-t-hingga-pork-barrel-politics>
- CNN Indonesia. (2024, 27 Maret). *Amin sindir bansos dan politik gentong babi ala Jokowi di Pilpres 2024*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240327123259-617-1079568/amin-sindir-bansos-dan-politik-gentong-babi-ala-jokowi-di-pilpres-2024>
- Creswell, J. W. (2007). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (2nd ed.). Sage.
- Haryanto, S. (2000). *Faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pilkada: Perspektif political marketing*. Badan Diklat Depdagri.
- Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14, 289–310. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508>
- Historia. (t.t.). *Gentong babi di parlemen*. <https://historia.id/politik/articles/gentong-babi-di-parlemen-DppeD/page/2> (Diakses 30 Maret 2024)
- Kavanagh, D. (1983). *Political behavior: Buku kedua*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kompas.com. (2024, 1 Februari). *Kemensos sampai pemda patut dilibatkan salurkan bansos supaya tak politis*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/01/06100061/kemensos-sampai-pemda-patut-dilibatkan-salurkan-bansos-supaya-tak-politis>
- Layton, M. L., Moreno, D., & Smith, A. E. (2015). Incorporating marginal citizens and voters: The conditional electoral effects of targeted social assistance in Latin America. *Comparative Political Studies*, 48(7), 854–881. <https://doi.org/10.1177/0010414014555442>
- Mesquita, B. B. de, Smith, A., Siverson, R. M., & Morrow, J. D. (2005). *The logic of political survival*. The MIT Press. (Asli diterbitkan 1999)
- Niskanen, W. (2017). *Bureaucracy and representative government*. Routledge. (Asli diterbitkan 1971)
- Omona, J. (2013). Sampling in qualitative research: Improving the quality of research outcomes in higher education. *Makerere Journal of Higher Education*, 4(2), 169–185.
- Plano, C. J., & Olton, R. (1999). *Hubungan internasional dalam berpolitik*. Abardin.

- Prasetyo, Y. E., dkk. (2023). *Dilema bansos: Pembelajaran dari pandemi dan urgensi reformasi tata kelola*. Penerbit Buku Kompas.
- Ramadhan, M. N., dkk. (2019). Klientelisme sebagai perilaku koruptif dan demokrasi banal. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 169–180.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto. (1992). *Voting behavior*. Rajawali Pers.
- Tempo. (2024). *Efek BLT terhadap suara Pilpres 2024*. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/487001/efek-blt-terhadap-suara-pilpres-2024>
- Weintraub, S., Thomas-Maddox, C., & Byrnes, K. (2013). *Perception and communication: A matter of perspective from communicating in your personal, professional and public lives*. Kendall Hunt Publishing.
- Wood, J. T. (2016). *Communication mosaics: An introduction to the field of communication*. Cengage Learning.
- Yongki, S. M. (2012). *Pemilu dan perilaku memilih 1955–2004*. Pustaka Eureka.